

## KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

M. Harry Mulya Zein<sup>1</sup>, Estovel Bintang Samuel Korompis<sup>2</sup>, Sisca Septiani<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri /

<sup>3</sup>Prodi Manajemen STIE Wikara

<sup>1</sup> harry.zein@kasn.go.id <sup>2</sup> sisseptiani@gmail.com

### ABSTRAK

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa. Keterlambatan pelaporan keuangan desa merupakan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, analisis faktor pendukung dan penghambat, serta menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat. Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dalam pembinaan dan pengawasan keuangan desa menunjukkan progres positif meskipun tantangan masih ada. Meskipun berhasil mencapai sejumlah indikator kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu terus memperkuat program dan anggaran, merekrut Sumber Daya Manusia spesifik, serta menyediakan fasilitas pendukung. Faktor pendukung internal seperti dasar hukum jelas, Sumber Daya Manusia memadai, dan keterlibatan tenaga ahli penting, sementara dukungan eksternal dari kerja sama dan masyarakat turut mendukung kinerja. Langkah-langkah seperti penambahan anggaran, koordinasi erat, dan partisipasi masyarakat membuktikan komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengatasi tantangan. Meskipun ada implikasi dan panduan dari penelitian ini, keterbatasan fokus geografis dan analisis faktor bisa membatasi generalisasi dan mempertimbangkan perkembangan baru setelah penelitian dilakukan.

**Kata kunci:** Kinerja; Pengelolaan Keuangan Desa; Pengawasan

### ABSTRACT

*The administration of village government affairs is part of the government carried out by the village government. One of the problems in village financial management is the village financial accountability process. Delays in village financial reporting are the responsibility of the Village and Community Empowerment Office. The study aimed to determine and analyze the Community and Village Empowerment Office's performance in managing village financial management in Minahasa Regency, North Sulawesi Province, analyze supporting and inhibiting*

*factors, and analyze efforts to overcome inhibiting factors. The research method used is qualitative. Data collection techniques using interviews, primary and secondary data sources are used. Data analysis techniques use data reduction, presentation, and conclusion/verification. The results of the research on the performance of the Community and Village Empowerment Office in Minahasa Regency, North Sulawesi, in village financial development and supervision, show positive progress even though challenges still exist. Despite achieving several performance indicators, the Community and Village Empowerment Office must continue strengthening programs and budgets, recruiting specific human resources, and providing supporting facilities. Internal supporting factors such as a clear legal basis, adequate human resources, and the involvement of experts are important, while external support from cooperation and the community also supports performance. Measures such as budget addition, close coordination, and community participation prove the commitment of the Community and Village Empowerment Office to overcome challenges. Despite the implications and guidance of this study, geographic focus and factor analysis limitations can limit generalizations and consider new developments after the study has been conducted.*

**Keywords:** *Performance; Village Financial Management; Supervision*

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan bagian negara yang mempunyai posisi paling dekat secara langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kus, 2021). Desa mempunyai kewenangan dalam mengelola keuangan desa (Kusrawan, 2019). Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari *good governance* yang mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah dalam proses pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan mempengaruhi tingkat akuntabilitas (Pangayow & Patma, 2021). Kabupaten Minahasa adalah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki total desa dan kelurahan sebanyak 270 yang tersebar di 25 kecamatan. Penyelenggaraan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa sampai akhir tahun anggaran 2021 belum berjalan dengan baik disebabkan oleh masih adanya desa-desa yang terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban melewati batas waktu yang ditentukan. Berikut data desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2019-2021:

**Tabel 1 Data Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 2019-2021**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Desa yang Menyampaikan LPJ Realisasi Pelaksanaan APB Desa					
			2019		2020		2021	
			Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat	Tepat Waktu	Terlambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Eris	8	-	8	-	8	2	6
2	Kombi	13	-	13	-	13	1	12
3	Lembean Timur	11	-	11	-	11	2	9
4	Kakas	13	-	13	-	13	1	12
5	Tomposo	10	-	10	-	10	1	9
6	Remboken	11	-	11	-	11	1	10
7	Langowan Timur	8	-	8	-	8	1	7
8	Langowan Barat	16	-	16	-	16	1	15
9	Sonder	19	-	19	-	19	1	18
10	Kawangkoan	4	-	4	-	4	1	3
11	Pineleng	14	-	14	-	14	4	10
12	Tombulu	11	-	11	-	11	2	9
13	Tombariri	10	-	10	-	10	6	4
14	Tondano Utara	3	-	3	-	3	-	3
15	Langowan Selatan	10	-	10	-	10	-	10
16	Langowan Utara	8	-	8	-	8	-	8
17	Kakas Barat	10	-	10	-	10	-	10
18	Kawangkoan Utara	6	-	6	-	6	1	5
19	Kawangkoan Barat	10	-	10	-	10	5	5
20	Mandolang	12	-	12	-	12	1	11
21	Tombariri Timur	10	-	10	-	10	2	8
22	Tompaso Barat	10	-	10	-	10	1	9
<b>Total</b>		227	-	227	-	227	34	1593

Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah Peneliti)

Dari data di atas dapat dilihat dari tahun ke tahun data desa yang terlambat lebih banyak daripada jumlah yang tepat waktu. Tingginya persentase jumlah desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa. Keterlambatan tersebut dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam hal tertib administrasi pemerintahan, baik pada DPMD Kabupaten Minahasa maupun pada pemerintahan desa, selain itu tanggung jawab pada pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan desa di Indonesia sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ada (Bayu Bawono et al., 2019). Pengelolaan keuangan desa didukung oleh sumber daya

pengelola (Ika Asmawati & Prayitno Basuki, 2019). Desa dituntut menjadi tata pemerintahan yang baik dengan pilarnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Makalalag et al., 2017). Perlunya pengawasan dari Lembaga terkait dalam pengelolaan keuangan desa (Azam Mustangin & Rani, 2020). Proses pengawasan tertuang pada peraturan dan perundang-undangan (Khoiriah & Meylina, 2017).

## **KAJIAN TEORI**

### **Kinerja**

Kinerja pegawai menurut Robbins dalam (Purba, 2020) merupakan peranan dari korelasi antara kecakapan dan semangat. Dalam manajemen, kinerja pegawai merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena kinerja individu pegawai dalam suatu organisasi adalah elemen dari kinerja organisasi dan bisa menentukan kinerja organisasi itu sendiri. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai kinerja pegawai akan dipengaruhi oleh kinerja individu dan tim karyawan

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Laporan keuangan menurut Harahap dalam (Triyuwono, 2019) merupakan keluaran serta hasil akhir dari proses akuntansi. Bastian dalam (Triyuwono, 2019) mengatakan laporan keuangan pada sektor publik adalah representasi posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan entitas publik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk pengumpulan datanya.

Informan dalam penelitian ini ditentukan oleh peneliti melalui *purposive sampling*. Berikut ini merupakan informan penelitian yang ditentukan oleh peneliti sebagai sumber data dalam penelitian ini dengan pertimbangan bahwa informan tersebut dapat memberikan data berupa informasi kepada peneliti terkait dengan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

**Tabel 2 Data Informan Penelitian**

No.	Informan	Jumlah Informan
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa	1
2.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Minahasa	1
3.	Kepala BPKAD Kabupaten Minahasa	1
4.	Kepala Inspektorat Kabupaten Minahasa	1
5.	Kepala DPMD Kabupaten Minahasa	1
6.	Kabid PKAKD DPMD Kabupaten Minahasa	1
7.	Camat Kombi	1
8.	Kepala Desa Kolongan	1
9.	Kepala Desa Kolongan satu	1
10.	Kepala Desa Rerer	1
11.	Kepala Desa Rerer Satu	1
12.	Kepala Desa Kombi	1
13.	Tokoh Masyarakat	1
14.	Tokoh Agama	1
15.	Tokoh Pendidikan	1
16.	Tokoh Pemuda	1
17.	Tokoh Perempuan	1
<b>Total</b>		<b>19</b>

*Sumber Data: Diolah Peneliti, 2023*

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Desa yang menjadi fokus penelitian yaitu, Desa Kolongan, Desa Kolongan Satu, Desa Rerer, Desa Rerer Satu, dan Desa Kombi. Teknik analisis data kualitatif meliputi tahapan 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh DPMD Kabupaten Minahasa memiliki peran penting dalam mengarahkan pengelolaan dana desa sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yang berlaku. DPMD Kabupaten Minahasa bertanggung jawab untuk mengawasi ketersediaan program, anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung yang mendukung pengelolaan keuangan desa.

DPMD Kabupaten Minahasa mengoperasikan program pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa melalui Bidang Penataan Kerja sama, Aset, dan Keuangan Desa. Program ini termasuk dalam APBD dan difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Koordinasi dengan Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Minahasa juga memainkan peran penting dalam upaya pembinaan dan pengawasan ini.

Meskipun upaya telah dilakukan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa masih memiliki beberapa keterbatasan. Program yang disetujui dalam APBD terbatas pada kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kinerja DPMD Kabupaten Minahasa jika tidak ditingkatkan.

Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2022, sebagai berikut:

<b>RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>				<b>Formulir RKPA SKPD</b>	
<b>Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022</b>					
Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
<b>Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sebelum Perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Bertambah/ (Berkurang)</b>	
<b>Jumlah Pendapatan</b>				<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.565.929.148</b>	<b>8.492.309.134</b>	<b>926.379.986</b>	
5 1 01	Belanja Pegawai	2.904.184.354	3.001.713.500	97.529.146	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.583.344.794	5.490.595.634	907.250.840	
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	78.400.000	0	(78.400.000)	
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>56.242.670</b>	<b>56.242.670</b>	<b>0</b>	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.242.670	56.242.670	0	
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>7.622.171.818</b>	<b>8.548.551.804</b>	<b>926.379.986</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>		<b>(7.622.171.818)</b>	<b>(8.548.551.804)</b>	<b>(926.379.986)</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>				<b>0</b>	
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>				<b>0</b>	
<b>Pembiayaan Netto</b>				<b>0</b>	

**Gambar 1 Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2022**

Ketersediaan anggaran pada program pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai berikut:

**Tabel 3 Anggaran Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa**

No.	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		
	Tahun	Jumlah Anggaran	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2021	Rp. 29.999.722	APBD
2.	2022	Rp. 26.098.984	APBD
3.	2023	Rp. 24.064.950	APBD

*Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah oleh Peneliti)*

Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa memang tersedia. Namun, dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa khususnya pada kegiatan fasilitas pengelolaan keuangan desa dapat dikatakan masih kurang jika dibandingkan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 227 desa di Kabupaten Minahasa.

DPMD Kabupaten Minahasa memiliki 22 pegawai dengan status PNS untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas. Meskipun jumlah pegawai sudah memenuhi kebutuhan, masih ada kekurangan dalam spesifikasi pegawai yang khusus untuk pengukuran spesifikasi bangunan sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan keuangan desa.

**Tabel 4 Data Pegawai ASN**

<b>1.</b>	<b>Jumlah ASN Menurut Golongan/Pangkat</b>	
	Golongan IV/c	1 orang
	Golongan IV/a	4 orang
	Golongan III/d	14 orang
	Golongan III/c	3 orang
	<b>Total 22 Orang</b>	
<b>2.</b>	<b>Jumlah ASN Menurut Jenjang Pendidikan</b>	
	S2	3 orang
	S1	19 orang
	<b>Total 22 orang</b>	

*Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah oleh Peneliti)*

Ketersediaan fasilitas pendukung program pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan upaya ini. Koordinasi dengan Inspektorat, BPKAD, dan Camat juga membantu dalam memastikan koherensi dalam pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan desa yang tertib dan transparan juga menjadi tujuan akhir dari upaya ini.

**Tabel 5 Meningkatnya Pembangunan Desa yang Berkualitas**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa yang Maju dan Mandiri	49,78%	70,48%	141%
2	Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang	5,72%	6,16%	107,6%
3	Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	3,96%	4,84% (11 desa)	122%

*Sumber: DPMD Kabupaten Minahasa, 2023 (Diolah oleh Peneliti)*

Tabel tersebut menggambarkan adanya capaian kinerja yang DPMD Kabupaten Minahasa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pembangunan desa.

Beberapa faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, spesifikasi pegawai yang kurang, dan kebutuhan fasilitas pendukung yang belum terpenuhi, DPMD Kabupaten Minahasa terus berupaya untuk mengatasi hambatan ini. Dengan upaya langsung dan tidak langsung yang dilakukan, DPMD berupaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa guna mendukung pembangunan desa yang berkualitas dan kesejahteraan masyarakat. Sama seperti penelitian (Shuha, 2018).

DPMD Kabupaten Minahasa berusaha mengatasi faktor penghambat melalui berbagai langkah. Ini termasuk pengusulan program dan anggaran setiap tahun, keterlibatan tenaga ahli dari Inspektorat untuk memenuhi kekurangan pegawai, serta langkah-langkah lainnya seperti bimtek pengelolaan keuangan desa dan monitoring yang intensif. Sama halnya pada penelitian (Pradana & Ma'ruf, 2021) Dinas PMD memberikan dampak terkait pengelolaan keuangan. Fungsi pengawasan sangat berperan (Prasetyaningtyas, 2018; Susanti et al., 2020; Wida et al., 2017). Pengawasan dapat mendeteksi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Roza & S, 2018). Pengelolaan dana desa yang baik membawa perubahan pada desa (Sara et al., 2021; Shaleh et al., 2020; Suryani, 2021).



## **SIMPULAN**

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, telah menunjukkan beberapa hasil positif. Meskipun DPMD telah berhasil mencapai sejumlah indikator pada berbagai dimensi kinerja, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitasnya. Upaya penguatan kinerja DPMD melalui peningkatan program dan anggaran, perekrutan SDM yang lebih spesifik, serta penyediaan fasilitas pendukung menjadi langkah penting. Meskipun telah berhasil mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa pada sebagian besar desa di wilayah Kabupaten Minahasa, DPMD masih perlu berupaya lebih keras untuk memastikan ketertiban pertanggungjawaban keuangan desa agar tercapai hasil yang lebih optimal.

Dalam konteks ini, faktor pendukung internal dan eksternal menjadi faktor kunci dalam membentuk kinerja DPMD. Dalam faktor pendukung internal, adanya dasar hukum yang jelas, sumber daya manusia yang memadai, dan usaha untuk mengisi kekosongan dalam SDM dengan melibatkan tenaga ahli menjadi elemen penting. Di sisi lain, faktor pendukung eksternal, seperti kerja sama dengan berbagai pihak terkait dan dukungan dari masyarakat, turut mendukung kinerja DPMD dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun ada faktor penghambat, baik internal maupun eksternal, DPMD telah melakukan upaya-upaya langsung dan tidak langsung untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah seperti penambahan anggaran, koordinasi yang lebih erat, serta partisipasi masyarakat membuktikan upaya konkret DPMD dalam mengatasi tantangan kinerjanya.

Implikasi dari hasil penelitian ini memberikan beberapa panduan yang berpotensi bermanfaat bagi pengambil kebijakan, praktisi, dan peneliti di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan keuangan desa. Pertama, implikasi dari hasil positif kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah bahwa upaya penguatan dan pengembangan program serta anggaran pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa perlu terus diperhatikan dan ditingkatkan. Dalam hal ini, rekomendasi yang muncul dari penelitian ini dapat membantu pengambil kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat guna dalam mengoptimalkan fungsi DPMD. Namun, perlu diingat bahwa peningkatan anggaran dan program harus disesuaikan dengan realitas ekonomi dan keuangan daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Azam Mustangin, M., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani*, 8(2), 193–206.
- Bayu Bawono, A. D., Purbasari, H., & Waskito Adi, S. (2019). Financial Management Reform Process In The Indonesian Village Government. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 962–967. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74131>
- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2017). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20–29.
- Kus, K. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(1), 25–37. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.139>
- Kusrawan, K. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, 10(2), 271–284. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v10i2.99>
- Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>
- Pangayow, B., & Patma, K. (2021). Planning, Accountability and Reporting of Village Financial Management in Indonesia. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(2), 197–203. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090208>
- Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus pada Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan). *Publika*, 285–294. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p285-294>
- Prasetyaningtyas, F. Y. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(1).
- Purba, R. R. (2020). A Determinasi Kepuasan Kerja Dan Kinerja Pegawai: Analisis Mutasi Pegawai Dan Penempatan Pegawai (Literature Review Manajemen Sumberdaya Manusia). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(2), 252–262. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i2.348>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal*

- Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.  
<https://doi.org/10.22304/pjih.v4n3.a10>
- Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Saputra, K. A. K. (2021). Rural Assets Administration and Establishment of Village-Owned Enterprises for the Enhancement of Rural Economy. *Jurnal Bina Praja*, 81–91.  
<https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.81-91>
- Shaleh, K., Subing, H. J. T., & Yustina, A. I. (2020). Village Financial Management: Based on Local Tradition. *Integrated Journal of Business and Economics*, 4(1), 23.  
<https://doi.org/10.33019/ijbe.v4i1.245>
- Shuha, K. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).
- Suryani, A. (2021). Village fund management (village case study in Tanjung Jabung Timur Regency). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(6), 963–973. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i6>
- Susanti, V., Rizal, S., Indrayenti, I., Khairudin, K., & Haninun, H. (2020). Pengaruh Pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Desa Atas Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 70–86.
- Triuwono, E. (2019). Laporan Keuangan Desa : Sebuah Tinjauan (Village Financial Statement: A Review). *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3370324>
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 148.  
<https://doi.org/10.19184/ejeba.v4i2.5356>